

**PERAN KOMUNIKASI STRATEGIS DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN
PUBLIK: LITERATUR REVIEW**

Sri Yulianty Mozin¹, Nabila Wulan Dari², Silfiani Geru³, Friska Nuriman Muchsin⁴,
Nuning Setiyawati⁵, Ibel Stefani Putri⁶, Salsabila Muslim⁷, Meriska Idji⁸, Imelda Suma⁹

Email: yulmozin@ung.ac.id¹, nwdari61@gmail.com², svigeru@gmail.com³,
friskamuchsin90@gmail.com⁴, nuningsetiyawaty@gmail.com⁵, ibelstefaniputri@gmail.com⁶,
salsabilamatowani@gmail.com⁷, meriskaidji57@gmail.com⁸, imeldasuma21@gmail.com⁹

Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi strategis dalam advokasi kebijakan publik. Komunikasi strategis merupakan alat penting dalam mempengaruhi keputusan kebijakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, mbingkai narasi kebijakan, dan menggerakkan dukungan publik. Studi ini mengeksplorasi landasan teoretis dan temuan empiris terkait komunikasi strategis, dengan fokus pada elemen utama seperti perancangan pesan, pemanfaatan media, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi strategis yang efektif meningkatkan penerimaan kebijakan dan mendorong pemerintahan partisipatif. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman strategi komunikasi dalam kebijakan publik serta wawasan bagi pembuat kebijakan dan kelompok advokasi.

Kata Kunci: Komunikasi Strategis, Advokasi Kebijakan Publik, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Peningkatan Kebijakan, Pemerintahan Partisipatif.

Abstract: *This literature review aims to analyze the role of strategic communication in public policy advocacy. Strategic communication is an essential tool in influencing policy decisions by engaging stakeholders, framing policy narratives, and mobilizing public support. The study explores theoretical foundations and empirical findings related to strategic communication, focusing on key elements such as message design, media utilization, and stakeholder engagement. The results indicate that effective strategic communication enhances policy acceptance and fosters participatory governance. This study contributes to the understanding of communication strategies in public policy and offers insights for policymakers and advocacy groups.*

Keywords: *Strategic Communication, Public Policy Advocacy, Stakeholder Engagement, Policy Framing, Participatory Governance.*

PENDAHULUAN

Komunikasi strategis memainkan peran penting dalam proses advokasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan masyarakat guna mendorong perubahan atau mempertahankan kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi strategis digunakan untuk membangun kesadaran, menggerakkan opini publik, serta memperkuat partisipasi pemangku kepentingan (Effendy, 2017).

Dalam era digital, komunikasi strategis semakin berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial dan teknologi informasi. Kecepatan penyebaran informasi memungkinkan aktor kebijakan menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat. Namun, tantangan seperti disinformasi dan berita palsu juga turut meningkat, yang memerlukan strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Selain itu, komunikasi strategis yang baik juga memungkinkan pembuat kebijakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan transparan, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan yang sedang diusulkan. Dengan komunikasi yang jelas dan terarah, kebijakan publik lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan mendukung partisipasi aktif mereka dalam proses kebijakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi strategis yang efektif dapat meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan melalui penggunaan media, strategi persuasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Cangara, 2020). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana elemen komunikasi strategis berkontribusi secara langsung dalam advokasi kebijakan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi strategis dalam advokasi kebijakan publik melalui tinjauan literatur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literature review untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan dengan topik komunikasi strategis dalam advokasi kebijakan publik. Metode ini bertujuan untuk memahami pola dan tren yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya serta mengidentifikasi konsep-konsep utama yang dapat mendukung efektivitas advokasi kebijakan.

Dalam proses pengumpulan data, studi ini menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan bidang kebijakan publik dan komunikasi strategis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui proses identifikasi, sintesis, dan kategorisasi temuan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komunikasi Strategis dalam Advokasi Kebijakan

Komunikasi strategis berfungsi sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada audiens yang tepat. Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kebijakan yang sedang diadvokasikan (Ardianto, 2014). Dengan pendekatan yang sistematis, pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Selain itu, komunikasi strategis yang efektif mampu membangun dialog yang konstruktif antara pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga memperkuat keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Pemanfaatan media sosial dan media konvensional dalam advokasi kebijakan mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Media sosial memberikan kemudahan dalam menyebarluaskan pesan kebijakan dengan jangkauan audiens yang lebih luas serta biaya yang relatif rendah. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan informasi kebijakan disampaikan secara interaktif dan menarik. Sementara itu, media konvensional, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah, tetap menjadi alat yang efektif dalam memperkuat kredibilitas dan legitimasi kebijakan di mata publik serta para pemangku kepentingan yang lebih

formal (Kriyantono, 2015). Dengan kombinasi yang tepat antara media sosial dan media konvensional, pesan kebijakan dapat tersampaikan dengan lebih optimal kepada berbagai segmen masyarakat.

Selain menyebarluaskan informasi, komunikasi strategis juga memiliki peran penting dalam membentuk citra kebijakan yang positif di tengah masyarakat. Dengan penggunaan retorika yang tepat, data yang valid, serta narasi yang menarik, kebijakan yang diusulkan dapat diterima lebih baik oleh publik, sehingga mengurangi risiko penolakan yang tidak berdasar. Narasi yang dibangun harus mampu menciptakan pemahaman yang jelas mengenai urgensi dan manfaat kebijakan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis fakta dan bukti ilmiah menjadi kunci utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diadvokasikan.

Keberhasilan advokasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumen yang disampaikan, tetapi juga oleh cara pesan dikemas dan disampaikan kepada audiens. Teknik komunikasi visual semakin banyak digunakan untuk meningkatkan daya tarik pesan kebijakan, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi yang beragam. Penggunaan infografis, video pendek, serta konten visual interaktif menjadi strategi efektif dalam menyederhanakan konsep kebijakan yang kompleks agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Selain itu, storytelling atau penceritaan berbasis pengalaman nyata dapat menjadi metode yang kuat dalam menggugah emosi dan membangun keterhubungan antara kebijakan yang diadvokasikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pembingkaiian Kebijakan (*Policy Framing*)

Narasi kebijakan yang efektif dapat membentuk persepsi publik dan meningkatkan penerimaan kebijakan. Pembingkaiian kebijakan yang kuat membantu memperjelas tujuan kebijakan dan menyesuaikannya dengan nilai serta kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut (Mulyana, 2018). Dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, kebijakan dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

Studi menunjukkan bahwa pembingkaiian yang kuat dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan baru. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa narasi kebijakan yang sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat lebih mudah diterima, sehingga meminimalisir penolakan serta meningkatkan partisipasi dalam implementasi kebijakan (Lestari, 2021). Faktor emosional dan kultural memainkan peran penting dalam bagaimana kebijakan diterima oleh masyarakat, sehingga penggunaan bahasa yang inklusif dan relatable menjadi sangat penting.

Framing juga memungkinkan kebijakan untuk dikomunikasikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi target audiens. Penggunaan metafora, analogi, serta kisah inspiratif sering kali lebih efektif dalam menyampaikan kebijakan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya berbasis angka dan data statistik. Penggunaan contoh nyata dari pengalaman masyarakat dapat memperkuat daya tarik dan dampak pesan kebijakan.

Dalam advokasi kebijakan, framing tidak hanya berfungsi untuk menarik perhatian publik tetapi juga untuk membangun argumentasi yang lebih kuat. Dengan merancang narasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan akan berkontribusi pada keberlanjutan dan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Melibatkan berbagai aktor, termasuk LSM, akademisi, dan masyarakat sipil, dapat memperkuat advokasi kebijakan. Keterlibatan yang luas memungkinkan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan legitimasi kebijakan (Putra, 2019). Dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, kebijakan yang dirumuskan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta lebih mudah diterima dan diterapkan di lapangan.

Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menciptakan legitimasi kebijakan yang lebih besar. Pemangku kepentingan yang merasa dilibatkan dalam proses kebijakan lebih cenderung mendukung implementasi dan berkontribusi dalam pelaksanaannya, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Widodo, 2020). Selain meningkatkan dukungan, keterlibatan pemangku kepentingan juga membantu dalam mengidentifikasi potensi tantangan dan solusi yang lebih komprehensif. Dengan adanya dialog dan diskusi terbuka, kebijakan dapat lebih fleksibel serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dapat menciptakan jejaring kerja sama yang lebih solid, mempercepat implementasi kebijakan, serta memastikan keberlanjutan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, kebijakan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang lebih luas, sehingga meningkatkan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi juga dapat memperkuat kapabilitas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Dengan memahami pentingnya komunikasi strategis dalam advokasi kebijakan, pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan perlu terus mengembangkan teknik dan strategi komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi terhadap tren komunikasi digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan yang partisipatif akan semakin memperkuat efektivitas advokasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, komunikasi strategis tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

Tantangan dalam Komunikasi Strategis

Disinformasi dan polarisasi politik sering kali menjadi hambatan dalam advokasi kebijakan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diusulkan. Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang dapat mengurangi dukungan publik serta menurunkan efektivitas advokasi kebijakan (Susanto, 2022). Selain itu, maraknya hoaks dan propaganda yang tersebar melalui media sosial semakin memperparah polarisasi, sehingga menciptakan tantangan tambahan bagi aktor kebijakan dalam menyampaikan pesan yang kredibel dan berbasis fakta.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya komunikasi yang lebih proaktif dengan strategi counter-narrative yang berbasis bukti. Pemerintah dan organisasi advokasi harus membangun mekanisme klarifikasi yang cepat, akurat, dan efektif dalam menangkal disinformasi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk meluruskan informasi yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan literasi kebijakan di kalangan masyarakat. Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, termasuk media konvensional dan digital, menjadi penting agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Selain disinformasi, kurangnya koordinasi antara aktor kebijakan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas komunikasi strategis. Dalam banyak kasus, ketidaksiynergian antara pemangku kepentingan menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi tidak konsisten dan membingungkan publik, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan yang sedang diadvokasikan (Fitriani, 2023). Ketidakefektifan antar aktor juga sering kali mengakibatkan tumpang tindih informasi dan lemahnya respons terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan efektivitas advokasi kebijakan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media harus diperkuat guna memastikan keselarasan dalam penyampaian pesan kebijakan kepada publik. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis data, advokasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, memperoleh dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Bambang Suprianto dkk tentang Strategi Penguatan Karakter Mahasiswa Melalui MataKuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan bahwa Matakuliah komunikasi dan advokasi kebijakan adalah matakuliah yang bertujuan untuk menumbuhkan penguatan karakter mahasiswa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Mata kuliah ini mempelajari tentang komunikasi yang dilakukan untuk memberikan dukungan atau pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, berupa tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu meliputi hukum dan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan institusional lainnya. Faktanya masih banyak mahasiswa yang menganggap matakuliah ini sebagai formalitas saja, praktek komunikasi dan advokasi kebijakan dianggap sekedar memenuhi kewajiban matakuliah. Kendala lainnya yakni bahan ajar yang kurang, caraproses pembelajaran dan mengimplementasi metode pembelajaran yang berbeda-beda antara dosen satu dengan yang lain (Bambang Suprianto and Aria Mulyapradana, 2023).

KESIMPULAN

Komunikasi strategis memainkan peran kunci dalam advokasi kebijakan, baik dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada audiens yang tepat, membangun citra positif kebijakan, maupun meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis fakta, komunikasi strategis dapat memperkuat dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan media sosial dan media konvensional secara sinergis juga menjadi alat efektif untuk menyebarluaskan pesan kebijakan dengan jangkauan yang luas dan biaya yang relatif rendah.

Pembingkaihan kebijakan (policy framing) yang kuat dan sesuai dengan nilai serta norma sosial masyarakat dapat meningkatkan penerimaan kebijakan dan mengurangi resistensi. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM, akademisi, dan masyarakat sipil, dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan. Namun, tantangan seperti disinformasi, polarisasi politik, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat efektivitas komunikasi strategis.

Dalam konteks pendidikan, matakuliah komunikasi dan advokasi kebijakan memiliki potensi besar untuk membentuk karakter mahasiswa dalam memahami

dan mengimplementasikan kebijakan publik. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya bahan ajar, variasi metode pembelajaran antar dosen, dan persepsi mahasiswa yang menganggap matakuliah ini sebagai formalitas. Pemerintah dan organisasi advokasi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih proaktif, berbasis bukti, dan inklusif untuk mengatasi disinformasi dan polarisasi politik. Kombinasi media sosial dan media konvensional harus terus dioptimalkan untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan pesan yang konsisten dan menarik. Mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan dan konsistensi pesan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2014). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bambang Suprianto and Aria Mulyapradana (2023) 'Strategi Penguatan Karakter Mahasiswa Melalui Matakuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan', *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), pp. 235–240.
- Cangara, H. (2020). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fitriani, R. (2023). Narasi Kebijakan dan Persepsi Publik: Studi Kasus Kebijakan Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 90-105.
- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations dan Komunikasi Politik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lestari, P. (2021). Peran Media Sosial dalam Advokasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 45-60.
- Mulyana, D. (2018). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, H. (2019). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 20-35.
- Santoso, B. (2020). *Media dan Politik: Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, A. (2021). Komunikasi Politik dan Partisipasi Publik dalam Kebijakan. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 120-135.
- Susanto, E. (2022). Tantangan Komunikasi Strategis dalam Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital. *Jurnal Politik dan Komunikasi*, 15(4), 110-125.
- Widodo, A. (2020). Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 75-90.
- Yulianto, T. (2022). Strategi Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan Sosial. *Jurnal Komunikasi Publik*, 18(3), 55-70.